



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2021-2026

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jl. Terpadu, Selatpanjang
Telp. (0763) 8001555 / Fax. (0763) 8001555
Website : dinsos.merantikab.go.id





BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 - 2026, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 - 2026, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan BAB III Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 64) diubah, sehingga BAB III Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

- (2) Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 64

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya jualah kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun ini dengan baik.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama kurun waktu perencanaan yaitu 2021-2026 dan sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selatpanjang, Desember 2022

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



M. KHARDAFI, SE, M.IP

Pembina / (IV.a)

NIP. 19771118 200901 1 005

DAFTAR ISI

Cover	
Perbub Renstra 2021-2026	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINSOS PPPA PPKB	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINSOS PPPA PPKB	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2026.....	35
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi Riau.....	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	50
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial PPPA PPKB.....	51
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial PPPA PPKB	51

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	63
BAB VII	KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN.....	79
BAB VIII	PENUTUP.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	21
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	21
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon	22
Tabel 1.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinsos PPPA PPKB	23
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA P2KB Kabupaten Kepulauan Meranti (Renstra Periode Lalu)	25
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinsos PPPA P2KB Kabupaten Meranti (Renstra Periode Lalu)	29
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	33
Tabel 3.2	Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti 2021-2026.....	37
Tabel 3.3	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra Kementerian Sosial	39
Tabel 3.4	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra Kementrian PPPA	42
Tabel 3.5	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra BKKBN.....	45
Tabel 3.6	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau.....	47
Tabel 3.7	Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra Dinas PPPA PPKB Provinsi Riau	49
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial PPPA PPKB Tahun 2021-2026	52
Tabel 5.1	Analisis SWOT berdasarkan isu – isu strategis daerah	53
Tabel 5.2	Penentuan Alternatif Strategi.....	54
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.....	57
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.....	63
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas SOSIALPPPAPPKB.....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAPPKB) merupakan salah satu dari 26 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki tiga urusan dan 15 sub urusan. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang berpulau-pulau, yang telah melaksanakan pilkada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Konsekuensi dari hasil pilkada, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang menjabarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAPPKB) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial PPPAPPKB dengan RPJMD, Renstra Kementerian PPPA, Renstra BKKBN, Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau serta dengan Renja diuraikan sebagai berikut:

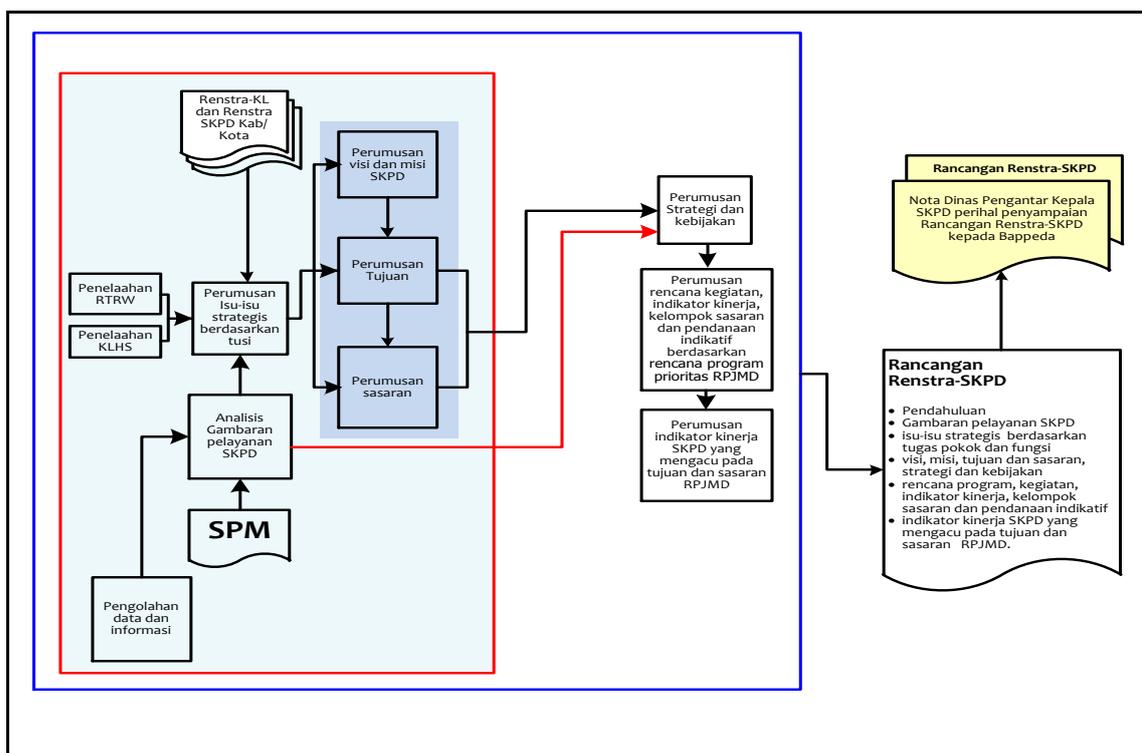
1. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Peraturan Bupati (PERBUP)

Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, RPJPD Kabupaten Kepulauan Meranti, RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 dan memperhatikan Renstra Kementerian Sosial, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Renstra BKKBN, Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Renstra disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Renstra sebelumnya dengan memperhatikan masukan dari stakeholder Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAPPKB) dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas SOSIALP3AP2KB
Kabupaten Kepulauan Meranti



Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undangn 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Meranti 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 18);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5); dan
 23. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 23);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Subkegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung Visi dan Misi Bupati;
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosPPPAPPKB) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti, telaahan Renstra Kementerian PPPA, , Kementrian Sosial dan BKKBN, telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan.

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINSOS PPPA PPKB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kepala

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, umum, kepegawaian, perencanaan dan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi keuangan dan perlengkapan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- 1) Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja ;
- 2) Menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan ;
- 3) Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi bagian umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan ;
- 4) Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana;
- 5) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Sosial

Bidang Sosial dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sosial.

Bidang Sosial dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai pokok menyelenggarakan urusan pada Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;

- 3) Penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan pertahun anggaran tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak sesuai dengan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- 4) penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan pertahun anggaran tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak sesuai dengan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- 5) Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 6) Penyelenggaraan penyusunan data gender di semua bidang pembangunan;
- 7) Penyelenggaraan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 8) Melaksanakan penyiapan pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 9) Penyelenggaraan penatalaksanaan administrasi, dokumen tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 10) Menyusun Pedoman teknis dan pelaksanaan Program pemenuhan Hak Anak;
- 11) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan hak anak terkait hak sipil, informasi partisipasi pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 12) Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;

- 13) Melaksanakan fasilitasi terkait dengan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan anak, partisipasi anak, dan perlindungan anak;
- 14) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemenuhan hak anak; dan
- 15) Menyelenggaraan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (nspk) dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten/kota;
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- 8) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 10) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten/kota;

- 11) Pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota;
- 12) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di kabupaten /kota;
- 13) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- 14) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- 15) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- 16) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 17) Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 18) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita;
- 19) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja (PIK-R);
- 20) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia;
- 21) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- 22) Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 23) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- 24) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

f. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan terdiri dari:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis , pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;

- 3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- 4) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang bergubungan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- 5) Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- 6) Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup satuan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai-pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;
- 7) Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan dinas;
- 8) Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- 9) Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;
- 10) Melakukan tugas di bidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- 11) Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan penyimpanan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- 12) Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- 13) Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja penyimpanan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- 14) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan aset;

- 15) Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- 16) Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- 17) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum, kepegawaian dan perlengkapan sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada sekretariat.

g. Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari:

- 1) Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan dan program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan program;
- 3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan program sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- 4) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan program serta menyiapkan bahan0bahan dalam rangka pemecahan masalah;

- 5) Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran;
- 6) Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran;
- 7) Melakukan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan program;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan dinas;
- 9) Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindaklanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- 10) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program;
- 11) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- 12) Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
- 13) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran;
- 14) Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA;
- 15) Menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan Tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat operasional, penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan) DPA;
- 16) Mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan (APBD-P) guna menampung usulan program pembangunan yang

mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya;

- 17) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan;
- 18) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- 19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- 1) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

2.1.2 Struktur Organisasi

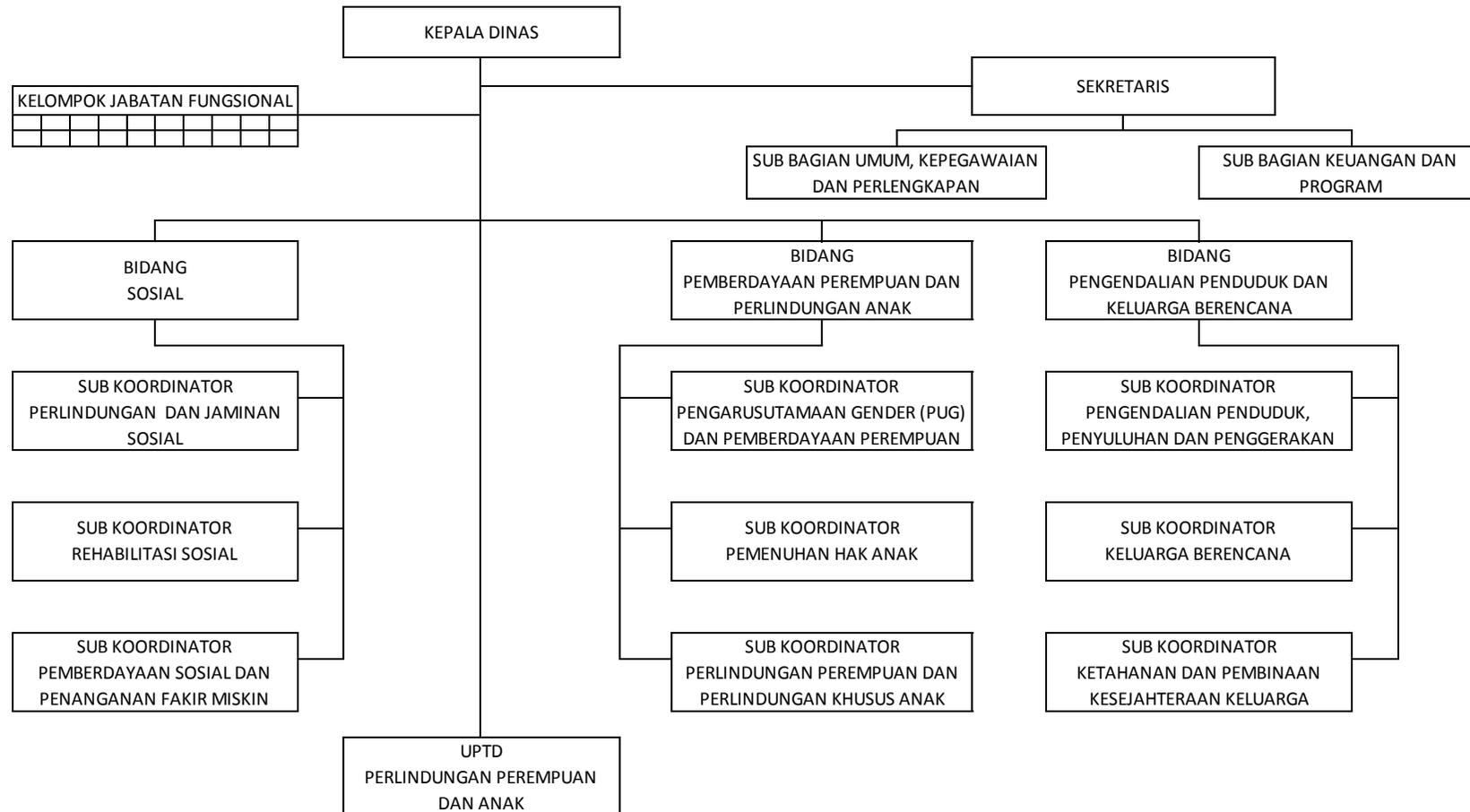
Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri dari;
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan Dan Program.
- c) Bidang Sosial, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan dan jaminan Sosial;

2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rehabilitasi Sosial;
 3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- d) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
 2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemenuhan Hak Anak;
 3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
- e) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keluarga Berencana;
 3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ketahanan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- f) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas sosial PPPA PPKB adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



Sumber : Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Adapun Sumber daya Manusia yang di miliki Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti adalah berjumlah 87 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 27 orang dan Pegawai Honorer sebanyak 60 Orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, Golongan serta Eselon dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
pada Dinsos PPPAPPKB Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Pegawai Honorer	Jumlah
1	SMP Sederajat	1	-	1
2	SMA Sederajat	1	25	26
3	D II	-	1	1
4	D III	3	9	12
5	S 1	16	25	41
6	S 2	6	-	6
7	S 3	-	-	-
	Jumlah	27	60	87

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Selanjutnya dilihat berdasarkan Golongan, Jumlah PNS yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Dinsos PPPAPPKB Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2022

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan II	1	2	3
2	Golongan III	13	9	22
3	Golongan IV	2	-	2

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Adapun jumlah pejabat Eselon II, III, dan IV pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
Pada DinsosPPPAPPKB Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2022

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	2	1	3
3	Eselon IV	3	-	3

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sebagai konsekuensi dari urusan yang harus diemban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi hal tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Penambahan SDM untuk mendukung urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Peningkatan wawasan dengan penyediaan peralatan yang mendukung;
4. Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi.
5. Peningkatan kompetensi ASN sesuai dengan tugas dan fungsi.

Memperhatikan tabel diatas, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan status golongan yang ada yaitu melalui kesempatan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan beasiswa pemerintah daerah, rekomendasi studi atas biaya sendiri, penyesuaian golongan bagi yang telah melanjutkan studi, serta peningkatan kinerja ASN. Karir ASN sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan, kinerja, serta goodwill dari pimpinan daerah. Karir tersebut dapat dibangun melalui berbagai upaya yang sinergis dan berkelanjutan baik pribadi maupun secara kelembagaan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana merupakan hal yang sangat urgen menopang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti. Sarana prasarana memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja organisasi serta kinerja aparatur. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sarana prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinsos PPPA PPKB
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Utama	1		1
2	Gedung Aula	1		1
3	Pertemuan	1		1
5	Gedung Asrama Pelajar KAT	1		1
6	TMP	1		1
7	Gedung TAGANA	1		1
8	Gedung UPPKH	1		1
9	Mushola	1		1
10	Mobil Avanza	1		1
11	Mobil Pick Up		1	1
12	Mobil Rescue Tagana	1		1
14	Kendaraan Bermotor Roda 2	20	5	25
15	Kamera	1	3	4
16	Speedboat TAGANA		1	1
17	Komputer	27	14	41
18	Laptop	7	5	12
19	Printer	16	44	60
20	Proyektor	9	4	13
21	Mesin Fotocopy		1	1
22	AC	16	16	32
23	Kipas Angin	11	29	40
24	Sound system	2	4	6
25	Gedung BLK	1		1
26	Gedung Alokon	1		1
27	Balai BPKB	9		9
29	Dispenser	2	3	5
30	Mesin Air	2	1	3
31	Mesin Potong Rumput	3	3	6
32	Mesin Genset	2		2
33	Meja rapat	2	3	5
34	Meja ½ biro	46	57	103

35	Kursi putar	34	19	53
36	Sofa	3	7	10
37	Kursi aula	57		57
38	Lemari arsip	11		11
39	Lemari besi	13	1	14

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Dinsos PPPA KB Kabupaten Kepulauan Meranti memerlukan sarana prasarana untuk Tahun 2021-2026 yang harus dipenuhi yaitu :

1. Sepeda Motor sebanyak 10 (sepuluh) Unit
2. Komputer Desktop sebanyak 20 (duapuluh) Unit
3. Laptop sebanyak 15 (lima belas) Unit
4. Printer sebanyak 20 (duapuluh) Unit
5. Printer Laser sebanyak 10 (sepuluh) Unit
6. Meja Rapat sebanyak 2 (dua) Unit
7. Meja Kursi kerja ½ biro sebanyak 15 (lima belas) Set
8. Lemari arsip sebanyak 20 (dua puluh) Unit
9. AC 1 PK sebanyak 10 (sepuluh) Unit
10. AC 2 PK sebanyak 5 (lima) Unit
11. Mesin Fotocopy sebanyak 1 (satu) Unit
12. Mesin Babat rumput sebanyak 2 (dua) Unit
13. Mesin Genset 60 kva sebanyak 1 (satu) Unit
14. Camera Mirrorless dan DSLR 2 (dua) Unit
15. Gimbal Kamera Mirrorless dan DSRL 2 (dua) Unit
16. Sofa 1 (satu) Set
17. Brankas 1 (satu) Unit
18. Hardisk external SSD 5 (lima) Unit
19. Hardisk Camera external 10 buah
20. Proyektor 4K Laser 5 (lima) Unit

Pertimbangan kebutuhan sarana prasarana itu karena barang-barang tersebut sudah waktunya harus diganti, serta kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA P2KB Kabupaten Kepulauan Meranti
(Renstra Periode yang Lalu)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				70	80	85	90	90	75	81	124,2	73,38	85	107%	101%	146%	82%	94%
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial				15	16	17	18	19	8,3	4,6	4,1	5,2	7,7	55%	29%	24%	29%	41%
3	Persentase PMKS yang Tertangani				50	55	60	65	70	60	60	39,92	61,35	77	120%	109%	67%	94%	110%
4	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar				10	12	14	16	18	8,3	4,6	4,1	5,20	7,7	83%	38%	29%	33%	43%
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial				n/a	50	52	54	56	n/a	13,71	13	39	39	n/a	27%	25%	72%	70%
7	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				10	12	14	16	18	8,1	10,16	10,82	10,82	9,89	81%	85%	77%	68%	55%
8	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR				20	22	24	26	28	16,67	16,67	13,33	13,33	13,33	83%	76%	56%	51%	48%
9	Partisipasi perempuan di lembaga swasta				46	48	50	52	54	13,4	42,5	28,99	28,99	32	29%	89%	58%	56%	59%
10	Rasio KDRT				0,15	0,13	0,90	0,8	0,7	0,12	0,13	0,7	0,4	0,4	125%	100%	129%	200%	175%
11	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur				4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	80%	80%	80%	80%	80%
12	Partisipasi angkatan kerja perempuan				65	67	69	71	73	64,93	68,71	67,49	68,29	65,60	100%	103%	98%	96%	90%
13	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
15	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
16	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
17	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
18	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
19	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
20	Laju Pertumbuhan Penduduk				0,60	0,59	0,58	0,57	0,58	0,63	0,59	0,62	11,1	1,62	95%	100%	94%	5%	36%
21	Total Fertility Rate (TFR)				2,36	2,35	2,33	2,31	2,28	2,68	2,62	2,37	2,50	2,20	88%	90%	98%	92%	104%
22	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB				n/a	n/a	90	91	92	n/a	n/a	82,86	82,86	82,86	n/a	n/a	92%	91%	90%
23	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk				n/a	n/a	50	55	60	n/a	n/a	22,86	22,86	22,86	n/a	n/a	46%	42%	38%
24	Ratio Akseptor KB				70	72	74	76	78	88,00	57	66	69	70	126%	79%	89%	91%	90%
25	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49				66	68	69	71	73	61,7	56,67	65,95	67,72	70,44	93%	83%	96%	95%	96%
26	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 (ASFR 15-19)				20,42	20,15	19,78	19,23	18,75	27,51	25,85	23,32	23,45	26,20	74%	78%	85%	82%	72%
27	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)				15,48	15,14	14,67	14,11	13,78	7,11	26,64	21,8	13,08	19,75	218%	57%	67%	108%	70%
28	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				42	44	46	48	50	50,67	29,69	29,41	31,10	37,62	121%	67%	64%	65%	75%
29	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB				78	80	82	84	86	68,17	78,46	82,68	82,75	65,29	87%	98%	101%	99%	76%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
30	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB				65	67	69	71	73	58,07	54,09	50,53	58,49	64,90	89%	81%	73%	82%	89%
31	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansis (BKL) Ber-KB				50	53	56	59	62	23,80	43,60	40,78	49,97	56,86	48%	82%	73%	85%	92%
32	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa				600	600	600	600	600	289	556	556	556	556	48%	93%	93%	93%	93%
33	Cakupan PKB/PLKB yang di Dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pengendalian penduduk				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
34	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan				300	300	300	300	300	300	239	234	300	300	100%	80%	78%	100%	100%
35	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
36	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga				100	100	100	100	100	56	58	60	63	65	56%	58%	60%	63%	65%
37	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				70	72	74	76	78	62	47	52	40	46	89%	65%	70%	53%	59%

Berdasarkan table 2.1 diatas, terlihat bahwa masih banyaknya pelayanan pada urusan sosial yang memiliki kesenjangan antara target dan capaian, namun ada juga yang sudah mencapai target 100%. Adapun faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan pada urusan sosial adalah sebagai berikut :

- a) Masih sedikit Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berperan aktif dalam penanganan PMKS di daerah;
- b) Masih kurangnya pemberdayaan PSKS;
- c) Belum maksimalnya pendataan terhadap penyandang Disabilitas dan lansia terlantar sehingga menyebabkan belum maksimalnya dalam pemberian bantuan;
- d) Masih belum maksimalnya pengelolaan data fakir miskin sehingga menyebabkan terkendalanya pemberian bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat;
- e) Masih minimnya SDM profesional dalam penanganan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- f) Minimnya fasilitas berupa sarana prasarana rehabilitasi sosial.

Adapun faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a) Belum Optimalnya pemberdayaan terhadap perempuan pada bidang politik, ekonomi dan sosial;
- b) Belum optimalnya identifikasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

- a) Belum adanya kebijakan dari daerah yang mengatur tentang pengendalian terhadap kuantitas dan kualitas penduduk;
- b) Belum optimalnya pembinaan terhadap ketahanan keluarga dalam membangun kualitas keluarga yang sejahtera;
- c) Rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB;
- d) Tingginya PUS yang harusnya berKB namun tidak berKB (*unmet need*).

Sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan beberapa layanan baik pada urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah adanya kerjasama dengan berbagai pihak dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sehingga capaian pada layanan yang di berikan sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinsos PPPA P2KB Kabupaten Meranti
(Renstra Periode yang Lalu)

No.	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.360.605.750	1.521.385.188	1.920.011.350	1.390.166.880		1.280.785.054	1.478.632.910	1.903.282.696	1.286.758.720		94%	97%	99%	93%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	143.376.000	356.200.000	233.215.000	67.280.000		134.001.000	350.040.500	231.451.145	58.007.000		93%	98%	99%	86%	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.000.000					99.952.856					100%			
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		90.779.241	57.445.000	9.480.000			84.836.200	52.235.000	9.480.000			93%	91%	100%	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.922.422.017					3.765.694.814					96%
6	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	37.638.927	990.624.700	1.960.828.700	12.771.254.007		37.537.600	988.079.700	1.861.850.700	8.338.220.635		100%	100%	95%	65%	
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial	234.471.100	239.278.100	276.053.200	111.873.000	26.600.300	223.053.000	235.089.700	193.038.000	94.220.000	24.338.300	95%	98%	70%	84%	91%
8	Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.174.192.374	400.358.573	669.090.500	102.550.000	9.147.050	1.153.095.324	398.932.573	663.140.500	102.450.000	9.147.050	98%	100%	99%	100%	100%
9	Program Rehabilitasi Korban Bencana		47.095.000	136.000.000	14.257.000	99.998.700		44.740.000	54.302.000	6.257.000	65.544.700		95%	40%	44%	66%
10	Program Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga		462.799.761	603.521.000	438.940.000	345.171.650		458.447.700	550.947.450	426.790.000	169.913.390		99%	91%	97%	49%
11	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial			152.289.000					152.289.000					100%		
12	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					9.068.800					9.068.800					100%
13	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	330.217.000	219.852.000	248.169.400	145.698.213		303.530.082	201.023.805	241.573.900	135.696.500		92%	91%	97%	93%	
14	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	248.143.000	259.020.000	400.678.750	57.798.540		225.580.900	255.954.000	376.393.500	53.073.100		91%	99%	94%	92%	
15	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					159.465.250					156.119.250					98%
16	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					1.959.983.505					1.602.476.650					82%
17	Program Perlindungan Perempuan					52.880.000					52.880.000					100%
18	Program pemenuhan Hak Anak (PHA)					85.106.800					83.825.492					98%
19	Program Perlindungan Khusus Anak					571.718.300					247.941.800					43%
20	Program Keluarga Berencana	1.639.300.000	2.656.650.868	3.966.394.400	3.637.812.000	2.874.269.055	1.435.690.000	2.605.024.468	3.087.849.900	2.415.876.567	1.565.694.549	88%	98%	78%	66%	54%
21	Program kesehatan Reproduksi Remaja	72.815.000	37.415.000	55.600.000	41.100.000		72.620.000	37.415.000	55.600.000	41.100.000		100%	100%	100%	100%	
22	Program pelayanan Kontrasepsi	132.100.000	314.290.000	40.000.000	16.500.000		124.967.000	283.022.744	39.996.000	16.500.000		95%	90%	100%	100%	
23	Program Pengendalian Penduduk		820.530.000	38.750.000		495.000.000		768.762.615	-		493.690.500		94%	0%		100%
24	Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)					1.032.000.000					715.606.020					69%

Berdasarkan table 2.2 diatas, dapat di lihat realisasi pendanaan Program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk Kabupaten kepulauan Meranti. Program tersebut merupakan Program yang mengacu pada Indikator Kinerja sebagaimana yang telah dijabarkan pada tabel 3.1 sebelumnya.

Apabila di Lihat dari segi Pertumbuhan anggaran, terlihat bahwasanya Rata-rata pertumbuhan Anggaran mengalami Naik Turun dari tahun ketahunnya. Adapun pertumbuhan anggaran paling Tinggi yaitu terjadi pada tahun 2020 dimana anggaran di gunakan untuk penanganan Covid-19. Sedangkan bila ditinjau dari Aspek Penyerapan Anggaran, terlihat bahwa rata-rata penyerapan anggaran dari tahun ke tahunnya berada diatas angka 85 % dan hanya beberapa Program saja yang penyerapan anggarannya di bawah 85 %.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kepulauan Meranti pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah PMKS masih tinggi namun penanganannya belum maksimal;
- b. Belum maksimalnya penerapan SPM bidang Sosial;
- c. Peran serta PSKS dan dunia usaha dalam penanganan PMKS;
- d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- e. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- f. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan termasuk TPPO terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- g. Munculnya berbagai pengaruh dari media sosial sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan oleh perempuan dan anak dalam mengendalikan kualitas kehidupan;
- h. Perkembangan IT yang sangat cepat menuntut penyediaan data berbasis IT yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkoneksi dengan pemerintah Provinsi Riau;
- i. Adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan, dan menjamin kelangsungan hidup dalam pemenuhan hak anak;
- j. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program KB;
- k. Adanya anggapan bahwa perempuan yang harus mengikuti program KB sementara laki - laki tidak perlu ber KB;
- l. Penguatan kapasitas SDM PKB dan PLKB dalam memberikan penyuluhan KB kepada masyarakat;
- m. Masih kurangnya Tribina, IMP, dan PIK-R yang tebetuk;

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kepulauan Meranti pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Sila Kelima Pancasila yang mengamanatkan tentang Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. UU 23 tahun 2014 mengamanatkan tentang pembagian urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar serta sinkronisasi sasaran antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota sehingga memudahkan penanganan PMKS yang menjadi target nasional maupun target pemerintah daerah dalam pembangunan;
- c. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Riau, memberikan peluang untuk meningkatkan pemberdayaan dan pelayanan terhadap PMKS dan PSKS serta kesetaraan gender dan program KB di daerah.
- d. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) memberikan kesempatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dan atau lembaga Donor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- e. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- f. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- g. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PPPA PPKB KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Hak-Hak Anak	Masih Rendahnya Capaian Pemberdayaan Gender	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Masih Rendah
			Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Kepulauan Meranti belum Optimal
		Belum Optimalnya Perlindungan Hak-Hak Anak	Masih Sedikitnya Lembaga yang bergerak dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak-hak Anak
2	Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Masih Tingginya Angka Kelahiran Remaja perempuan usia 15-19 yang berpotensi menyebabkan Resiko Stunting pada Bayi	Belum Optimalnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
			Belum Optimalnya Pembinaan Keluarga Berencana
		Masih sedikitnya jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Belum Optimalnya Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera
			Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas keluarga
3	Masih Rendahnya Penanganan Terhadap pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum Optimalnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Masih Rendahnya Cakupan PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial
			Masih Rendahnya Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial

			Belum Optimalnya Penanganan terhadap Korban Bencana
		Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan terhadap PPKS belum maksimal	Belum Optimalnya Pemberdayaan Sosial bagi KAT dan PSKS
		Belum Optimalnya Pencegahan dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan	Masih Rendahnya Cakupan Perlindungan Perempuan
			Masih Rendahnya Cakupan Perlindungan Khusus Anak
4	Masih Rendahnya Kualitas Manajemen Pemerintah Pada Perangkat Daerah	Masih Rendahnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih cenderung bersifat administratif
			Masih Terdapat ASN yang ditempatkan belum sesuai dengan Anjab dan ABK yang tepat sehingga pengelolaan ASN belum baik
			Masih Rendahnya Kepatuhan Pelayanan Publik
			Informasi pelayanan publik yang belum tersosialisasi secara luas
			Belum tersusunnya Proses Bisnis perangkat daerah dan pemerintah daerah dengan baik
			Belum adanya komitmen kepala daerah maupun kepala perangkat daerah untuk menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) dalam implementasi SAKIP
			Belum memiliki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2026.

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah *Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat di Provinsi Riau Indonesia*.

Unsur visi tersebut adalah *Maju, Cerdas* serta *Bermartabat*. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial PPPAPPKB adalah unsur Bermartabat.

Meranti bermartabat ketika meranti tidak lagi terisolir wilayahnya, tingginya tingkat pengangguran, sempitnya lapangan kerja, tingginya tingkat kemiskinan, rendah kualitas dan daya saing sumber daya manusianya. Dengan pembangunan meranti maju dan cerdas maka akan melahirkan meranti yang bermartabat yaitu meranti yang cerdas terbilang dan gemilang yang diperhitungkan dalam kemajuannya.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan **6 (enam) Misi** sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Pemerataan Pembangunan Infrastruktur adalah suatu kondisi penyediaan infrastruktur yang merata terutama infrastruktur dasar seperti tersambungya jalan antar desa ke kecamatan dan jalan kecamatan ke jalan kabupaten, tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan, tersedianya air bersih bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Beriman dan Bertakwa Yang Memiliki Daya Saing

Kuantitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah suatu upaya untuk meningkatkan Manusia yang berkualitas yang memiliki kemampuan daya saing serta memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Daya saing sendiri merupakan kemampuan untuk menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat yang direfleksikan pada adanya upaya yang kuat untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan daya beli.

3. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Mutu dan Kualitas Kesehatan Masyarakat adalah suatu upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan melengkapi sarana dan prasarana Kesehatan di Kecamatan serta menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten

Kepulauan Meranti menjadi Rumah Sakit Rujukan dengan meningkatkan tipe RSUD menjadi tipe B.

4. Menciptakan Produktivitas Ekonomi Masyarakat

Produktifitas ekonomi masyarakat adalah suatu upaya menciptakan iklim usaha kreatif, inovatif dan produktif, menciptakan sistem pertanian yang unggul dan modern, menciptakan swasembada sapi dengan memberikan pelatihan, pembinaan dan permodalan bagi UMKM, petani, peternak dan nelayan.

5. Membangun Harmonisasi Sosial- Budaya Masyarakat

Harmonisasi sosial budaya adalah kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan saling bertoleransi dengan tidak adanya konflik antar umat beragama maupun antar suku sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap keanekaragaman suku, adat istiadat dan budaya.

6. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab serta memberikan layanan prima

Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta memberikan layanan prima adalah kondisi dimana pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien diantaranya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya percepatan dan ketepatan pemeberian pelayanan kepada masyarakat diantaranya dengan menciptakan pelayanan “*smart city*” dengan konsep pelayanan 1 hari selesai.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial PPPA PPKB Kabupaten Meranti mendukung pencapaian misi 2, 4 dan 6 yaitu :

1. Misi Ke 2 yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Beriman dan Bertakwa Yang Memiliki Daya Saing.
2. Misi Ke 4 yaitu Menciptakan produktivitas ekonomi masyarkat.
3. Misi Ke 6 yaitu Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yag baik, bersih dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinsos PPPAPPKB adalah sebagai berikut:

1. Misi 2

- a. Tujuan** : Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya manusia yang Berkualitas.
- b. Sasaran** : Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

2. Misi 4

- a. **Tujuan** : Menurunkan Tingkat Kemiskinan.
- b. **Sasaran** :Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. Misi 6

- a. **Tujuan** : Mewujudkan reformasi birokrasi
- b. **Sasaran** :Meningkatnya kualitas Manajemen Pemerintah, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Meranti tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti 2021-2026

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi Ke 2-3 : Meningkatkan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Beriman dan Bertakwa yang Memiliki daya Saing,</p> <p>Tujuan : Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</p>	<p>1. Minimnya dukungan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.</p> <p>a. Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran responsife Gender Belum Optimal</p> <p>b. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</p> <p>2. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>1. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</p>
2	<p>Misi Ke 4 : Menciptakan Produktivitas Ekonomi Masyarakat</p>	<p>1. Kompetensi SDM masih belum optimal</p> <p>2. Belum tersedianya data yang akurat</p>	<p>1. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah</p> <p>2. Koordinasi yang baik antar Unit Organisasi</p>

	<p>Tujuan: Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan</p>	<p>3. Dukungan dana operasional belum optimal 4. Rendahnya peran serta sektor swasta dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Miskin dan PMKS lainnya.</p>	<p>3. Kemudahan akses informasi Kesejahteraan social 4. Semakin baiknya Peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terhadap kejadian tanggap darurat bencana.</p>
	<p>Sasaran: Meningkatnya Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial</p>		
3	<p>Misi Ke 6 : Menciptakan Tata Kelola, Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bertanggung Jawab Serta Memberikan Pelayanan Prima</p>	<p>1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Dan Informasi Publik. 2. Kurang Memadainya Sarana Dan Prasarana Untuk Menunjang Pelayanan Perangkat Daerah. 3. Kualitas Dokumen Perencanaan Dan Akuntabilitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah sesuai peraturan. 4. Masih rendahnya nilai Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.</p>	<p>1. Adanya komitmen Kepala Daerah. 2. Semakin membaiknya para digma ASN dalam pelayanan Publik. 3. Semakin mudahnya akses informasi kepada masyarakat. 4. Semakin membaiknya keterbukaan laporan keuangan.</p>
	<p>Tujuan : Mewujudkan Reformasi Birokasi</p>		
	<p>Sasaran : • Meningkatnya kualitas Manajemen Pemerintah</p>		

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi Riau

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

A. Tujuan

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial tahun 2020-2024 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah:

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan.
2. Meningkatkan Layanan yang berkualitas Oleh Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan yang Profesional.
3. Mewujudkan Penguatan tata Kelola serta meningkatkan Efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

B. Sasaran

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2020-2024 diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan, melalui indikator :
 - a. Indeks Kesejahteraan Sosial.
 2. Meningkatnya Kualitas pemberi layanan kesejahteraan Sosial, melalui indikator:
 - a. Indeks Partisipasi Sosial;
 - b. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang tersertifikasi (ASN dan Non-ASN);
 - c. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi;
 - d. Persentase (%) daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan.
 3. Meningkatnya Kualitas data terpadu Kesejahteraan Sosial, melalui Indikator :
 - a. Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.
- Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Renstra Kementerian Sosial tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra kementerian Sosial

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah penduduk miskin yang banyak2. Terbatasnya kuota bantuan dari program-program pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen kepala daerah dalam mengentaskan kemiskinan2. Hadirnya program-program baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk penanganan PMKS

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
2.	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang masih belum begitu aktif 2. Fungsi dan tugas masing-masing SDM masih belum jelas 3. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PSKS yang bertambah (Tagana, Unit Reaksi Cepat, Sakti Peksos, PSM dan TKSK) 2. Terdapat beberapa kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas PSKS 3. Setiap tahun di anggarakan bantuan untuk Panti-Panti Sosial
3.	Meningkatnya data terpadu kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data DTKS yang tidak valid dan tumpang tindih. 2. Belum memadainya anggaran untuk Verifikasi dan Validasi DTKS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran data DTKS agar bisa mendorong efisiensi penyaluran bantuan social (Bansos) dan bantuan lainnya dari pemerintah ke masyarakat

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian PPPA

A. Tujuan

Tujuan Renstra Kementerian PPPA 2020-2024 untuk mendukung Upaya Pencapaian Visi dan Misi Kementerian PPPA sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan;
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak;
3. Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan PP PA;
4. Meningkatnya perlindungan hak Perempuan dari kekerasan termasuk PPPO;
5. Meningkatnya perlindungan Khusus Anak;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian PPPA

B. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Kementerian PPPA 2020-2024 di arahkan untuk mendukung tujuan Kementerian PPPA, sasaran strategis tersebut adalah :

1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui indicator :
 - a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - c. TPAK Perempuan
 - d. Indeks PUG Nasional
2. Meningkatnya kualitas Tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta Perlindungan Khusus Anak, Melalui Indikator :
 - a. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
 - b. Proporsi Perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun
 - c. Jumlah Kabupaten/Kota dengan peringkat KLA
 - d. Persentase Balita yang mendapat pengasuh tidak layak
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, Melalui Indikator :
 - a. Indeks pembangunan Partisipasi masyarakat
 - b. Indeks Kualitas Keluarga
4. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO, melalui Indikator :
 - a. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir
 - b. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif
 - c. Persentase pemda yg menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)
5. Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus, melalui Indikator:
 - a. Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)

- b. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif
 - c. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
 - d. Persentase Pemda melaksanakan layanan sesuai standar
6. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA, melalui Indikator :
- a. Indeks Reformasi Birokrasi
 - b. Opini BPK atas Laporan Keuangan
 - c. Tingkat Maturitas SPIP
 - d. Nilai SAKIP

Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian PPPA tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra Kementerian PPPA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya motivasi perempuan di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk ikut serta dalam berorganisasi • Adanya budaya patriarki yang berkembang di masyarakat • Rendahnya kemampuan perempuan dalam mengakses kesempatan mengembangkan diri dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya organisasi-organisasi perempuan yang mendukung pemberdayaan perempuan • Adanya pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas perempuan • Adanya usaha-usaha perempuan yang mulai berkembang • Terbukanya peluang Kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai Lembaga non pemerintah dan akademik
2.	Meningkatnya kualitas Tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya akses untuk tumbuh kembang anak • Kurangnya dokter spesialis anak yang mampu memantau tumbuh kembang anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan dan pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya konselor untuk anak di sekolah-sekolah atau ruang public • Kurangnya pusat kreativitas anak untuk pengembangan kreativitas dan karakter anak • Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya 1.000 hari pertama kelahiran • Kurangnya ruangan khusus bagi anak seperti ruang bermain, dan ruang menyusui di area public seperti perkantoran, rumah sakit, dan Pelabuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah terbentuknya forum anak kabupaten • Sudah terbentuknya program sekolah ramah anak • Terbentuknya perda kabupaten layak anak • Terbentuknya Gugus Tugas KLA Kabupaten Bersama Dinas terkait
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak • Kurangnya pemahaman orang tua untuk pengasuhan dan tumbuh kembang anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya jejaring kerja untuk memperkenalkan dan membantu program peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kualitas keluarga
4.	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Makin bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan • Kurangnya pemahaman perempuan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan • Sulitnya mendeteksi adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya usaha pendampingan terhadap perempuan yang mengalami kasus kekerasan • Adanya sosialisasi terhadap undang-undang perlindungan perempuan dan anak • Adanya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
			penanganan kasus terkait perempuan dan anak • Tersedianya UPT PPA
5.	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	• Masih banyaknya korban kekerasan anak yang enggan melapor	• Adanya koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait penanganan kasus terhadap korban kekerasan anak. • Adanyan pendampingan secara khusus bagi korban
6.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA	–	–

3.3.3 Telaah Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024

Renstra BKKBN 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 yang di undangkan tanggal 11 Mei 2020.

Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

A. Tujuan BKKBN

Selama Periode pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024, BKKBN Memiliki tujuan untuk:

1. Mewujudkan Keluarga Berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan Bahagia.
2. Mengendalikan Struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

B. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi, dan janji Presiden 2020-2024 dan prioritas pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, Serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan

BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ *unmet need* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 pada tahun 2024.
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada tahun 2024.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 pada tahun 2024.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2020-2024, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.5
Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan Renstra BKKBN

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran PUS untuk ber KB masih Rendah • Masih ada tanggapan di masyarakat banyak Anak banyak Rezeki 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan pemerintah pada program pengendalian penduduk • Kerja sama yang baik dengan fasilitas kesehatan
2.	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya angka perkawinan usia muda 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Pemerintah daerah dalam

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Modern (mCPR)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang ber-KB yang masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan angka Pravalensi Kontrasepsi Modern • Kegiatan penyuluhan di lapangan oleh PLKB/PKB tentang alat Kontrasepsi
3.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pendidikan pasangan usia Subur • Jumlah Wanita bekerja yang tinggi • Pengetahuan tentang alat Kontrasepsi yang masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pendidikan (KIE) tentang keluarga berencana
4.	Menurunnya Angka Kelahiran Remaja	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pendidikan yang masih rendah • Pengetahuan remaja tentang Kesehatan reproduksi yang masih rendah • Tingkat ekonomi yang rendah 	—
5.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Stunting masih tinggi • Angka usia Perkawinan • Tingkat ekonomi yang rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses informasi, Pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawata, pengasuhan dan perkembangan anak. • Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, Pendidikan konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga • Peningkatan kualitas Lingkungan keluarga
6.	Meningkatnya Medidan Usia Kawin Pertama Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pendidikan yang masih rendah • Pengetahuan remaja tentang Kesehatan reproduksi yang masih rendah • Tingkat ekonomi yang rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pendidikan Kesehatan reproduksi remaja • Penyediaan pelatihan usaha ekonomi kreatif terutama pada daerah pedesaan

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- Tujuan dari Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau adalah :
 1. Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS di Provinsi Riau, dengan Indikatornya : Jumlah Jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Sasaran Strategis Dinas Sosial yang ingin dicapai adalah:
 1. Peningkatan Pelayanan terhadap PMKS di Provinsi Riau, dengan Indikatornya : Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan Sosial ;
 2. Peningkatan Peran PSKS dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Riau, dengan Indikatornya : Jumlah PSKS yang di berdayakan.

Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan
Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Peningkatan Pelayanan terhadap PMKS di Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya kuota anggaran dari pemerintah daerah untuk program-program penanganan terhadap PMKS 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Kepala Daerah Untuk Mengentaskan Kemiskinan • Hadirnya Program-program pemerintah baik pusat maupun daerah untuk penanganan Kemiskinan
2.	Peningkatan Peran PSKS dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Dana Operasional yang belum Optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat beberapa Kegiatan Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas PSKS

3.3.5 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas PPPAPPKB Provinsi Riau yang terkait dengan pelayanan urusan PPPA dan PPKB adalah sebagai berikut:

- Tujuan dari Renstra Dinas PPPAPPKB Riau adalah :
 1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dengan indikator pengukurnya :
 - a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - b. Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit layanan terpadu
 2. Mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas dengan Indikatornya adalah Total Fertility Rate (TFR).
- Sasaran yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan dari Renstra Dinas PPPAPPKB Riau adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatnya Kualitas hidup dan perempuan di berbagai bidang Pembangunan ;
 - a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
 2. Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak ;
 - a. Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit layanan terpadu.
 3. Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi ;
 - a. Contraceptive Prevalence Rate/CPR
 4. Meningkatnya Median Kawin Pertama Perempuan ;
 - a. Nilai Tengah Tahun Kawin pertama Perempuan

Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Sasaran Renstra Dinas PPPA Provinsi Riau tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
 Identifikasi faktor penghambat dan pendorong berdasarkan
 Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk
 dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan di berbagai bidang Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman perempuan tentang pentingnya peran perempuan dalam pembangunan • Budaya Patriarki yang masih melekat kuat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai terbukanya peluang Kerjasama Pemerintah Daerah terhadap Lembaga Non Pemerintahan dan Akademik • Berkembangnya usaha-usaha perempuan • Terbukanya akses dan informasi
2.	Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM dan Prasarana dalam pelayanan korban kekerasan anak dan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya UPT PPPA • Adanya koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait penanganan kasus korban kekerasan anak dan perempuan
3.	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya angka perkawinan usia muda • Pengetahuan tentang ber KB yang masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi modern • Kegiatan penyuluhan dilapangan oleh PLKB/PKB tentang alat kontrasepsi
4	Meningkatnya Median kawin Pertama perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pendidikan yang masih rendah • Pengetahuan remaja tentang Kesehatan reproduksi yang masih rendah • Tingkat ekonomi yang rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pendidikan Kesehatan reproduksi remaja • Penyediaan pelatihan usaha ekonomi kreatif terutama pada daerah pedesaan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan, oleh karena itu tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD).

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Hak-Hak Anak;
2. Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Masih Rendahnya Penanganan Terhadap pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
4. Masih Rendahnya Kualitas Manajemen Pemerintah pada Perangkat Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial PPPA PPKB

Tujuan yang akan ditempuh dalam lima tahun adalah :

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan indikator tujuan:
 - a. Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Indikator Tujuan:
 - a. Tingkat Kemiskinan
3. Meningkatkan Kesetaraan Gender dengan Indikator Tujuan :
 - a. Indeks Pembangunan Gender

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial PPPA PPKB

Sasaran yang akan ditempuh dalam lima tahun adalah :

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan indikator sasaran:
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS dengan indikator sasaran:
 - a. Persentase PMKS yang tertangani
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan indikator sasaran:
 - a. Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan terpadu
 - b. Persentase Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah
5. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dengan Indikator sasaran:
 - a. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial PPPA PPKB
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN						
				SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	N/A	15	20	33	67	93
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	15	18	20	25	29
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	25,28	24,61	22,10	19,50	19	18
		Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	77	79	88	89	90	92
		Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,20	2,19	1,59	1,51	1,49	1,45
3.	Meningkatkan Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender	%	86,30	86,40	86,50	86,60	86,70	86,80
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	%	96	97	100	100	100	100
			Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	5,06	6,11	7,90	8,72	9,85	10,69

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran misi dalam wujud strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan menjadi pedoman dan akan menuntun untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efisien dan efektif.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategis membutuhkan kestuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indicator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strenght, weakness, oppuortunity, dan threats). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi factor intenal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud Nampak dalam Tabel berikut ini :

Tabel 5.1 :
Analisis SWOT berdasarkan isu – isu strategis daerah

INTERNAL	EKSTERNAL
Kekuatan (<i>strenght</i>)	Peluang (<i>oppornity</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Komitmen apartur dalam Menjalankan fungsi OPD 2. Makin membaiknya akuntabilitas kinerja aparatur 3. Terbangunnya koordinasi yang baik di setiap tingkatan unit kerja 4. Semakin bertambahnya Peksos Profesional dalam penanganan PMKS 5. Sudah terbentuknya Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak 6. Tren Peningkatan angka KB Aktif 7. Dukungan Teknolog iInformasi yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan program NAWACITA 2. Masyarakat Ekonomi Asean 3. Dukungan kebijakan penanganan PMKS dari pemerintah pusat 4. Komitmen Kepala Daerah 5. Dukungan program K/L teknis dalam penanganan masalah di daerah 6. Partisipasi masyarakat yang semakin membaik 7. Tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun 8. Semakin membaiknya keterbukaan informasi di masyarakat

Kelemahan (<i>weakness</i>)	Ancaman (<i>threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka PMKS masih tinggi 2. Cakupan Penanganan PMKS masih rendah 3. rehabilitasi PMKS belum maksimal 4. Akses, fasilitas, dan system pelayanan rehabilitasi yang masih rendah 5. Akses terbatas dan daerah terisolir 6. Belum optimalnya pelayanan publik 7. Belum optimalnya system akuntabilitas kinerja aparatur dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah 8. Terbatasnya anggaran daerah 9. Pembinaan PSKS belum maksimal 10. Kualitas dan kuantitas SDM PLKB masih minim 11. Minimnya sarana pendukung Lembaga perlindungan perempuan dan Anak 12. Belum maksimalnya Sistem Pengelolaan data terpadu di OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis kepulauan menyebabkan biaya pembangunan yang besar 2. Minimnya dukungan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi 3. Produksi dan harga pasar migas menurun 4. Belum akuratnya data kemiskinan, dan PMKS, 5. Maraknya peredaran NARKOBA 6. Rendahnya peran serta sector swasta dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Miskin dan PMKS lainnya. 7. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program KB

Tabel 5.2
Penentuan Alternatif Strategi

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALTERNATIF STRATEGI
Tujuan I: Meningkatkan Reformasi Birokrasi OPD			
1.	Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi OPD	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Reformasi Birokrasi <p style="text-align: center;"><i>Formulasi/Rumus</i> <i>Perhitungan :</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Nilai Pengungkit = Hasil Pemenuhan + Hasil Reform</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Perubahan • Deregulasi Kebijakan • Penataan dan Penguatan Organisasi • Penata Laksanaan • Penataan Sistem Manajemen SDM • Penguatan Akuntabilitas • Penguatan pengawasan • Peningkatan Kualitas Pelayanan
Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
1.	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase PMKS yang tertangani <p style="text-align: center;"><i>Formulasi/ Rumus Perhitungan</i> :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Kelembagaan PSKS • Peningkatan Kualitas SDM PSKS • Pendampingan sarana prasarana PSKS • Pengelolaan TMP • Penyediaan Operasional bagi PSKS • Pemberdayaan Fakir Miskin dan KAT • Pemberian bantuan pemenuhan

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALTERNATIF STRATEGI
		<p><i>Jumlah PMKS yang Tertangani X 100 %</i></p> <p><i>Jumlah PMKS Yang Ada</i></p>	<p>kebutuhan dasar bagi korban Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Rehabilitas bagi PMKS di Luar Panti • Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga • Pendampingan Program Keluarga Harapan • Pembinaan Anak Terlantar • Pembinaan Penyandang Cacat • Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan dan PMKS Kabupaten
2.	<p>Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (FTR) <p><i>Formulasi/Rumus Perhitungan :</i></p> $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{bi}{Pif} \times K$ <p><i>TFR : Angka Kelahiran Total</i> <i>ASFR_i : Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur</i> <i>bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur pada tahun tertentu</i> <i>pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama</i> <i>i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49)</i> <i>K = bilangan konstanta biasanya 1000</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pelayanan KB pria • Penyediaan sarana pendataan KB • Penyediaan Sarana Petugas Lapangan KB • Peningkatan Kualitas Penyuluhan Keluarga Berencana • Peningkatan pelayanan distribusi ALKON • Penyuluhan langsung kepada masyarakat • Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyuluh KB • Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) • Peningkatan Kelembagaan Konseling (PIK-R) • Penyusunan Kebijakan Pengendalian Penduduk
<p>Tujuan 3 : Meningkatkan Kesenjangan Gender</p>			
1.	<p>Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu <p><i>Formulasi/Rumus Perhitungan :</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Kelembagaan perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) • Peningkatan SDM Lembaga perlindungan perempuan dan anak • Pembentukan satgas P2TP2A • Rumusan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan anak • Penyusunan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan anak

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALTERNATIF STRATEGI
		<p><i>Jumlah Pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh <u>Unit Pelayanan Terpadu</u> X100 %</i></p> <p><i>Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke Unit pelayanan terpadu</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Forum Anak • Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja • Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Perempuan dan anak • Pembinaan Kreatifitas Anak • Peningkatan Capaian Kabupaten Layak Anak
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah <p><i>Formulasi/ Rumus Perhitungan :</i></p> <p><i>$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\%$</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam rangka pemenuhan hak partisipasi perempuan dalam Lembaga pemerintah • Memperkuat Lembaga/Jejaring PUG untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi Pelaksanaan PUG • Pembinaan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan • Pelatihan PPRG bagi OPD • Pelatihan Keterampilan Wanita • Pembinaan Organisasi Wanita • Sosialisasi Gender

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinsos PPPA KB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026

VISI	: MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MAJU, CERDAS, dan BERMARTABAT DI PROVINSI RIAU INDONESIA		
MISI VI	: Menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang baik, bersih dan Bertanggung jawab serta memberikan Layanan Prima		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN 1			
Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Peningkatan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Peningkatan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Peningkatan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

MISI IV	Menciptakan Produktivitas Perekonomian Masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN 2			
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Peningkatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Peningkatan Penyediaan Layanan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
		Meningkatkan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Peningkatan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Peningkatan Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin	Peningkatan Layanan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
			Peningkatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Penanganan terhadap Korban Bencana	Peningkatan Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

			Peningkatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Peningkatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Penguatan Kebijakan Pengendalian Penduduk		Peningkatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
				Peningkatan Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana		Peningkatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
				Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
				Peningkatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Pemberdayaan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

		Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Misi II - III	Meningkatkan dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya Manusia Beriman dan Bertakwa yang memiliki daya saing, serta meningkatkan Mutu dan layanan Masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN 3			
Meningkatkan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

			Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Perlindungan Perempuan	Peningkatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

			Peningkatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial PPPA PPKB
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	N/A	15		20		33		66		93		93			
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	15		18		20		25		29		29			
	X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	%	95	95	5.436	95	5.456	95	5.477	95	5.498	95	5.719	95	27.586		
	X.XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	29	29	50	29	60	29	60	29	60	29	60	174	290		
	X.XX.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	10	3	10	3	10	3	10	3	10	18	50	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
	X.XX.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	6	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
	X.XX.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	6	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
	X.XX.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	6	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
	X.XX.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	6	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
	X.XX.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian	Laporan	22	22	20	22	30	22	30	22	30	22	30	132	140	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
	X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	3.371	100	3.436	100	3.505	100	3.616	100	3.718	100	17.646		
	X.XX.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	30	3.300	30	3.350	30	3.415	30	3.520	30	3.617	180	17.202	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
	X.XX.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5	51	5	60	5	63	5	68	5	71	30	313	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	36	36	20	36	26	36	27	36	28	36	30	216	131	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20	12	100		
		X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	6	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	8	15	8	15	8	15	8	15	8	15	48	75	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi ASN	%	-	100	25	100	25	100	26	100	27	100	28	100	131		
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	5	5	5	5	6	6	6	7	6	8	28	31	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	10	50	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	10	50	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	682	100	728	100	746	100	754	100	768	100	3.678		
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang Disediakan	Paket	-	1	2	1	10	1	14	1	15	1	15	5	56	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	7	11	131	7	140	8	142	9	144	9	148	51	705	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	1	5	1	5	2	10	2	10	3	15	9	45	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	20	1	22	1	24	1	26	1	28	6	120	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan Yang Disediakan	Paket	2	2	60	2	66	2	70	2	73	2	75	12	344	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan-Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	20	10	20	10	21	11	22	11	23	12	106	54	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	12	25	12	25	12	25	12	25	12	25	60	125	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	130	150	389	160	410	160	410	160	410	160	410	920	2.029	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	-	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-	100	443	100	438	100	255	100	297	100	330	100	1.763		
		X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	2	70	1	35	1	35	1	35	1	35	6	210	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	2	70	1	35	1	35	1	35	1	35	6	210	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	4	40	3	30	3	30	3	30	3	30	16	160	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	10	20	3	8	5	10	2	7	5	10	25	55	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	-	1	110	1	110	1	110	1	110	1	170	5	610	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	1	93	30	200	3	15	12	60	6	30	52	398	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	6	40	3	20	3	20	3	20	3	20	18	120	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kegiatan	3	3	542	3	550	3	550	3	550	3	550	18	2.742		
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	12	15	12	15	12	15	12	15	12	15	60	75	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	127	12	135	12	135	12	135	12	135	72	667	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	400	12	400	12	400	12	400	12	400	72	2.000	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	303	100	199	100	315	100	174	100	245	100	1.236		
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan Di Bayarkan Pajaknya.	Unit	-	1	10	-	-	1	10	-	-	1	10	3	30	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir				
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Di bayarkan pajaknya	Unit	30	38	33	39	34	39	34	39	34	39	35	224	170	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti	
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	-	4	20	-	-	4	20	2	10	4	20	14	70	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti	
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	1	150	1	110	1	150	1	100	1	150	5	660	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti	
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	80	40	102	55	80	40	60	30	60	30	382	195	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti	
		X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	1	50	-	-	1	61	-	-	-	-	2	111	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti	
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat																					
				Tingkat Kemiskinan	%	25	24,61	22,10		19,50		19,00		18,00		18,00					
Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS																					
				Persentase PMKS yang tertangani	%	77	79	88		89		90		92		92					
				Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	%	75	76	167	78	168	80	168	82	169	84	170	84	842			
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																		
		1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat terpencil	%	-	34	54	40	55	45	55	50	57	55	58	55	279			
		1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota	Keluarga	-	25	21	25	21	25	21	25	23	25	24	125	110	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti	
		1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	-	25	33	25	34	25	34	25	34	25	34	125	169	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti	
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	%	-	71	113	71	113	73	113	75	112	77	112	77	563			
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan kabupaten/Kota	Orang	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti	
		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	9	53	9	53	9	53	9	52	9	52	45	263	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti	
		1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/Kota	Keluarga	-	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	10	50	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan meranti	
		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	-	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	5	75	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat Dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan kabupaten/Kota	Sertifikat	-	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	5	75	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Orang	50	50	100	20	100	20	101	20	101	20	102	-	504		
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asal	Orang	50	50	100	20	100	20	101	20	101	20	102	180	504		
		1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik Debaraksi di daerah Provinsi untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal kewenangan kabupaten/Kota	Orang	50	50	100	20	100	20	101	20	101	20	102	180	504	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Orang	25	30.178	150	30.178	150	30.178	150	30.178	150	30.178	151	-	751		
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	%	-	14	75	26	75	37	75	52	75	69	76	69	376		
		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan kabupaten/Kota	Orang	-	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	50	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan kabupaten/Kota	Orang	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan kabupaten/Kota	Orang	-	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	10	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota	Orang	-	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	15	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	15	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	15	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta kelahiran, Surat Nikah dan kartu Identitas Anak Bagi Penyandang Disabilitas kewenangan kabupaten/Kota	Orang	-	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	10	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	50	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan layanan Data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	80	5	80	5	80	5	80	5	80	5	400	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan kabupaten/Kota	Orang	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	10	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	10	20	10	20	10	20	10	20	10	21	50	101	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial	%	100	100	75	100	75	100	75	100	75	100	75	100	375		
		1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	80	5	80	5	80	5	80	5	80	5	400	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	50	25	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota	Orang	-	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	25	50	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, kartu tanda Penduduk, Akta kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	50	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	22	15	22	15	22	15	22	15	22	15	110	75	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	100	150	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	85	85	15.971	85	15.839	85	15.906	85	15.973	85	16.041	85	79.730		
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Cakupan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	%	100	100	151	100	219	100	186	100	253	100	221	100	1.030		
		1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang di jangkau Kewenangan kabupaten Kota	Orang	-	15	31	30	61	30	61	30	61	30	61	135	275	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	30	90	32	98	20	65	44	132	33	100	164	485	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan kabupaten/Kota	Orang	-	15	30	30	60	30	60	30	60	30	60	135	270	DINSOS PPPA PPKB	kabupaten kepulauan meranti
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah Padan dengan data Kependudukan	%	85	87	15.820	89	15.620	91	15.720	92	15.720	94	15.820	94	78.700		
		1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	-	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	25.000	15.000	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	14.000	33.000	750	33.000	750	33.000	750	33.000	750	33.000	750	179.000	3.750	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapat Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota	Keluarga	-	15.000	11.370	15.000	11.370	15.000	11.370	15.000	11.370	15.000	11.370	75.000	56.850	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	250	700	150	500	200	600	200	600	250	700	1.050	3.100	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	%	90	90	163	90	163	90	163	90	164	90	164	90	817		
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	83	100	83	100	83	100	84	100	84	100	417		
		1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan permakanan 3X1 Hari Dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan kabupaten/Kota	Orang	25	45	33	45	33	45	33	45	34	45	34	250	167	DINSOS PPPA PPKB	Kepulauan Meranti
		1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	150	75	DINSOS PPPA PPKB	Kepulauan Meranti
		1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	-	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	5	75	DINSOS PPPA PPKB	Kepulauan Meranti
		1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	50	DINSOS PPPA PPKB	Kepulauan Meranti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir				
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	50	DINSOS PPPA PPKB	Kepulauan Meranti	
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	30	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	180	400			
		1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	-	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	5	75	DINSOS PPPA PPKB	Kepulauan Meranti	
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	65	30	65	30	65	30	65	30	65	180	325	DINSOS PPPA PPKB	Kepulauan Meranti	
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	Unit	1	1	100	1	100	1	101	1	101	1	102	-	504			
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang di Pelihara	Unit	1	1	100	1	100	1	101	1	101	1	102	1	504			
		1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan nasional kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	45	1	45	1	46	1	46	1	47	5	229	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti	
		1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang Terpenuhi pemeliharaannya pada Taman makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	225	225	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti	
		1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	-	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10	60	50	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti	
Meningkatkan Kesetaraan Gender																					
Indeks Pembangunan Gender					%	86,30	86,40	86,50	86,60	86,70	86,80	86,80									
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																					
Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah					%	5,06	6,11	7,9	8,72	9,85	10,69	10,69									
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	%	30	30	157	30	158	40	158	40	189	50	159	50	821			
		2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	%	-	30	35	30	36	50	36	50	47	60	37	60	191			
		2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	5	1	5	1	5	1	10	1	5	5	30	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	5	1	5	1	5	1	10	1	5	5	30	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota.	Perangkat Daerah	-	20	25	20	26	20	26	20	27	20	27	100	131	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	%	20	20	40	20	40	25	40	25	40	35	40	35	200		
		2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	5	75	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	24	6	25	6	25	6	25	6	25	6	25	54	125	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	40	40	82	40	82	45	82	45	102	55	82	55	430		
		2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	-	2	5	2	5	2	5	2	14	2	5	10	34	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100	100	70	100	70	100	70	100	71	100	70	600	351	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	-	1	7	1	7	1	7	1	17	1	7	5	45	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas kualitas hidup	KPM		70	100	70	100	70	101	70	101	70	102	-	504		
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	2	50	2	50	2	51	2	51	2	52	10	254		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	-	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	5	75	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	1	35	1	35	1	36	1	36	1	37	5	179	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	10	250		
		2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	-	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	50	30	50	30	50	30	50	30	50	30	250	150	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Kepulauan Meranti	Dokumen	-	1	100	1	100	1	101	1	101	1	102	-	504		
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	2	100	2	100	2	101	2	101	2	102	10	504		
		2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	-	1	50	1	50	1	51	1	51	1	52	5	254	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	%	96	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	50	100	200	100	200	100	201	100	201	100	202	-	1.004		
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Ratio KDRT	%	0,014	0,008	80	0,007	80	0,006	81	0,005	81	0,004	82	0,004	404		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan, Program, dan kegiatan Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	40	1	40	1	41	1	41	1	42	6	204	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	-	30	40	30	40	30	40	30	40	30	40	150	200	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang di sediakan	%	-	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	250		
		2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan layanan Pengaduan	Orang	-	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	50	150	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan kabupaten/Kota	Layanan	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kegiatan	-	3	70	3	70	3	70	3	70	3	70	15	350		
		2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	-	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	100	150	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	-	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	50	100	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota	Dokumen	-	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkat kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	Lembaga	100	115	125	115	125	115	125	115	125	115	125	-	625		
		2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	%	-	100	25	100	25	100	25	100	25	100	25	100	125		
		2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	11	500		
		2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	70	1	70	1	70	1	70	1	70	5	350	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	6	150	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfrenhsif	%	100	100	505	100	505	100	505	100	505	100	505	100	2.525		
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Ratio KDRT	%	0,014	0,008	55	0,007	55	0,006	55	0,005	55	0,004	55	0,004	275		
		2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	55	1	55	1	55	1	55	1	55	5	275	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang di sediakan	%	100	100	280	100	280	100	280	100	280	100	280	100	1.400		
		2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota	Orang	-	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	250	500	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Tindak Lanjut Pengaduan Yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan kabupaten/Kota	Layanan	50	55	180	55	180	55	180	55	180	55	180	325	900	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	2	170	2	170	2	170	2	170	2	170	11	850		
		2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	105	1	105	1	105	1	105	1	105	6	525	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	65	1	65	1	65	1	65	1	65	5	325	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk																				
				Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,20	2,19		1,59		1,51		1,49		1,45		1,45			
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	%		1	200	1	200	1	200	1	201	1	201	-	1.002		
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kegiatan	-	3	115	3	115	3	115	3	116	3	116	15	577		
		2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen	-	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Laporan	-	9	35	9	35	9	35	9	36	9	36	45	177	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	2	85	2	85	2	85	2	85	2	85	10	425		
		2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	-	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	5	75	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	-	9	70	9	70	9	70	9	70	9	70	45	350	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	69	71	2.600	72	2.700	73	2.801	74	2.901	75	3.002	75	14.004		
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan	1	6	710	6	710	6	760	6	760	6	760	31	3.700		
		2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	-	4	30	4	30	4	30	4	30	4	30	20	150	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana) Sesuai kearifan Budaya Lokal	Dokumen	-	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	5	750	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	-	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	-	18	140	18	140	18	190	18	190	18	190	90	850	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Laporan	9	9	260	9	260	9	260	9	260	9	260	54	1.300	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	-	2	80	2	80	2	80	2	80	2	80	10	400	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	660	100	710	100	710	100	710	100	710	100	3.500		
		2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dilini Lapangan Oleh PKB/PLKB	Organisasi	-	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	100	500	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	9	9	160	9	210	9	210	9	210	9	210	54	1.000	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	-	3.030	400	3.030	400	3.030	400	3.030	400	3.030	400	15.150	2.000	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	-	35	830	38	880	41	931	44	1.031	47	1.132	47	4.804		
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	-	11	20	15	20	15	20	15	20	15	20	71	100	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	-	500	200	500	200	500	200	500	200	500	200	2.500	1.000	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	2	4	200	4	200	4	200	6	300	8	401	28	1.301	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca pelayanan bagi peserta KB	Orang	-	200	50	200	50	200	50	200	50	200	50	1.000	250	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	-	15	50	15	50	15	50	15	50	15	50	75	250	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	-	30	130	30	130	40	181	40	181	40	181	180	803	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	11	11	150	11	150	11	150	11	150	11	150	66	750	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	-	10	30	25	80	25	80	25	80	25	80	110	350	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	%	100	100	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100	2.000		
		2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	26	26	400	26	400	26	400	26	400	26	400	156	2.000	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	%	74	75	2.040	76	2.041	77	2.042	78	2.043	79	2.044	-	10.210		
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	-	31	1.850	35	1.851	39	1.852	43	1.853	48	1.854	48	9.260		
		2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPP	Jumlah kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	-	6	90	6	90	6	90	6	90	6	90	30	450	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	30	25	400	25	400	25	400	25	400	25	400	155	2.000	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
							Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	-	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100	45	500	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	-	400	200	400	200	400	200	400	200	400	200	2.000	1.000	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	2.100	741	900	741	900	741	900	741	900	741	900	5.805	4.500	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	-	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	5	400	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	-	1	80	1	81	1	82	1	83	1	84	5	410	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	-	63	190	66	190	69	190	71	190	74	190	74	950		
		2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	-	5	60	5	60	5	60	5	60	5	60	25	300	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	-	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti
		2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	-	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	5	400	DINSOS PPPA PPKB	Kabupaten Kepulauan Meranti

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD	
		Tahun 2021	Satuan	2022	2023	2024	2025		2026
1.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	Nilai	15	18	20	25	29	29
2.	Persentase PMKS yang tertangani	77%	%	79	88	89	90	92	92
3.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	96%	%	97	100	100	100	100	100
4.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	5,06%	%	6,11	7,90	8,72	9,85	10,69	10,69
5.	Angka Kelahiran Total/TFR	2,20	Angka	2,19	2,01	1,92	1,87	1,79	1,79

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti , maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.